

## BUDAYA KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA

Lovia Evanne<sup>1</sup>, Agus Srimudin<sup>2</sup>

loviaevarne@uss.ac.id

agusrimudin@uss.ac.id

### ABSTRACT

*There are three kinds of political culture in Indonesian society, namely parochial political culture, subjects and participants. Parochial political culture can be seen in the lowly educated small society. They tend to be less concerned with the output that comes out of the government, which according to them does not affect their lives. Older political culture usually occurs in upper middle class society with higher levels of education and who have an interest and concern for political issues, but tend to give up because they feel they do not have the power to influence or change government policy. Meanwhile, the political culture of participants appears to be members of society who have the slightest influence in government decision making. Political elites, party elites, pressure groups or pressure groups such as NGOs, or a group of students carrying out government policies that harm the people, are examples of participant political culture.*

**Keywords:** *Political culture, parochial, subordinates, participants*

---

### ABSTRAK

*Budaya politik pada masyarakat Indonesia meliputi tiga macam, yaitu budaya politik parokial, kawula dan partisipan. Budaya politik parokial terlihat pada masyarakat kecil yang umumnya berpendidikan rendah. Mereka cenderung kurang peduli dengan output yang keluar dari pemerintah, yang menurut mereka tidak mempengaruhi hajat hidup mereka. Budaya politik kawula lazimnya terjadi pada masyarakat menengah ke atas dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki minat dan perhatian pada isu-isu politik, tetapi cenderung pasrah karena merasa mereka tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi atau merubah kebijakan pemerintah. Sementara budaya politik partisipan tampak pada anggota masyarakat yang merasa mempunyai pengaruh sekecil apapun dalam pembuatan keputusan pemerintah. Para elit politik, elit partai, pressure group atau kelompok-kelompok penekan seperti LSM, atau bahkan sekelompok mahasiswa yang aktif melakukan demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, merupakan contoh budaya politik partisipan.*

**Kata kunci:** *Budaya politik, parokial, kawula, partisipan.*

---

<sup>1</sup> Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Selatan, Palembang  
Peran Media Massa Dalam Komunikasi Politik Di Indonesia  
p-ISSN....., e-ISSN.....

## 1. Pendahuluan

Komunikasi politik sangat penting peranannya bagi setiap negara baik yang berbentuk otoriter maupun liberal. McQuail (1992:472-473) mengartikan komunikasi politik sebagai keseluruhan proses penyampaian informasi termasuk fakta, pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan dan sebagainya, pertukaran dan pencarian tentang itu semua yang dilakukan oleh para partisipan dalam konteks kegiatan politik yang lebih bersifat melembaga).

Komunikasi politik di sebuah negara biasanya tidak lepas dari nilai-nilai budaya yang ada di negara tersebut. E.B. Taylor (1871) seperti yang dikutip oleh Lubis (2002:2), mendefinisikan budaya sebagai sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Budaya dan komunikasi mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi dan pada gilirannya

komunikasi pun turut menentukan memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya seperti yang dikatakan Edward T. Hall bahwa komunikasi adalah Budaya dan Budaya adalah komunikasi. Pada satu sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara "horizontal" dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada sisi lain, budaya merupakan norma-norma atau nilai-nilai yang dianggap sesuai untuk kelompok tertentu (Mulejana dalam Lubis, 2002:1).

## 2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode riset pustaka. Dimana hanya memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Karena itu riset ini hanya membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa melakukan riset lapangan (Zed, 2004:1-2).

Disini penulis mencoba mengemukakan berbagai teori dari perpustakaan, kemudian mengkonfrontirnya dengan kenyataan di

lapangan dengan mengacu pada berita-berita di media, kemudian lalu topik yang diteliti.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Hasil penelitian**

Ditetapkannya Pancasila, yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa, sebagai ideologi negara Republik Indonesia merupakan tanda bahwa aspek budaya begitu kuat pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, terdapat dua ideologi dasar yang berada pada dua kutub yang berbeda dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yaitu ideologi otoritarian (otoritarianisme) dan libertarian (liberalisme). Diantara kedua kekutub yang berbeda itu terdapat banyak varian yang berkembang, sesuai dengan konteks historis, kultural, sosial, politik dan ekonomi setiap bangsa. Salah satu varian ideologi yang berada di luar otoritarian dan libertarian itu ialah ideologi Pancasila (Pancasilaisme). Namun sebelum lahirnya Pancasila pada permulaan abad ke 20, di Eropa Timur telah berkembang juga suatu varian ideologi, yaitu ideologi komunis (komunisme) yang sangat berpengaruh pada Perang Dunia II (Arifin, 2011:48-49). Pancasila mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama yang

berbeda selama lebih dari setengah abad. Maka tak heran Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, bahkan memuji Pancasila sebagai ideologi alternatif saat memberi kuliah umum di Universitas Indonesia di Jakarta tahun 2010 lalu. Negara Republik Indonesia masih tetap utuh dengan Pancasila sebagai dasar negara hingga saat ini.

Ideologi otoritarian yang bertolak dari hasil olah intelektual sejak zaman Plato dan Machiavelli yang mengembangkan filsafat otoritarian terutama dalam bidang politik yang mencakup juga bidang komunikasi publik. Otoritarianisme yang berkembang pesat hingga awal abad ke 19, bukan saja telah melahirkan sistem politik, melainkan juga telah melahirkan sistem komunikasi yang dikenal sebagai sistem komunikasi otoritarian, terutama dalam penerbitan pers atau surat kabar. Dalam sistem otoritarian tidak dikenal adanya kebebasan bagi rakyat dalam menyatakan pendapat dan menyebarkan informasi publik (freedom of information), tidak dikenal juga adanya kebebasan pers (freedom of the press) karena pers harus memiliki izin dan disensor oleh penguasa.

Sebaliknya sejumlah filosof dan pemikir seperti John Locke, John Milton, John Stuart Mill dan Thomas Jefferson mengembangkan filsafat

atau ideologi libertarian (liberalisme) yang bersumber dari individualisme. Liberalisme mengajarkan bahwa manusia itu dilahirkan sama dan manusia sebagai makhluk berakal secara individual mampu mandiri dan memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal itu akhirnya melahirkan kapitalisme dalam ekonomi dan demokrasi dalam politik untuk memnuhi dan melindungi kepentingan individu sebagai bagian penting dari hak asasi manusia. Liberalisme yang berkembang pesat sejak abad ke 19, bukan saja telah melahirkan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis, melainkan juga melahirkan sistem komunikasi libertarian, terutama dalam penerbitan pers dan surat kabar. Dalam sistem komunikasi libertarian, pendapat setiap individu dapat dinyatakan dengan bebas. Demikian juga terdapat kebebasan informasi publik (*freedom of information*) bagi rakyat dan kebebasan pers (*freedom of the press*), karena itu pers tidak memerlukan izin dan tidak boleh disensor oleh penguasa (Arifin, 2011:49-50). Sementara Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila, telah mengalami beberapa era, dimana masing-masing era memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda. Pada era Orde Lama (1945-1967), meski sistem pemerintahannya terkesan otoriter dengan

ditandai pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, tapi kebebasan pers masih bisa hidup secara demokratis. Sementara pada era Orde Baru (1967-1998) dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang kerap mendung-dung sistem demokrasi Pancasila, namun kenyataannya nuansa otoritarian begitu kuat terasa. Tidak ada kebebasan menyatakan pendapat bagi rakyat dan kebebasan pers dibelenggu oleh penguasa. Pers wajib memperoleh izin dari pemerintah dan pemerintah berhak melakukan sensor, bahkan bila perlu membredel pers yang dianggap menentang pemerintah. Baru setelah berakhirnya Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden, keran demokrasi mulai terbuka. Indonesia memasuki babak baru yang dikenal dengan nama Orde Reformasi. Pada masa ini rakyat Indonesia baru dapat menikmati kebebasan menyatakan pendapat. Komunikasi politik tidak lagi didominasi oleh pemerintah sehingga opini publik pun dapat berkembang secara dinamis. Demikian juga dengan pers, yang saat ini memiliki kebebasan menyampaikan informasi kepada publik.

### 3.2 Pembahasan

Budaya politik adalah pola tingkahlaku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Istilah budaya politik tertentu melekat pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional maupun modern (Kantaprawira, 1988:25). Tentu dengan demikian budaya politik akan mempengaruhi pola-pola komunikasi antar anggota kelompok masyarakat dengan sesamanya maupun dengan penguasa.

Menurut Almond dan Verba (1990:16-17), kebudayaan politik suatu bangsa merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu.

Tipe-tipe orientasi politik diantaranya:

Pertama, orientasi kognitif: pengetahuan tentang dan kepercayaan kepada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.

Kedua, orientasi afektif: perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya

Ketiga, orientasi evaluatif: keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar

nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Sementara yang menjadi objek orientasi politik menurut Kantaprawira (1988:31-32) meliputi keterlibatan seseorang terhadap:

Pertama, sistem politik secara keseluruhan, meliputi intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran, lingkup lokasi, persoalan kekuasaan, karakteristik konstitusional negara atau sistem politiknya.

Kedua, proses input. Meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat, termasuk prakasa untuk menerjemahkan atau mengkonversi tuntutan-tuntutan sehingga menjadi kebijaksanaan yang otoritatif sifatnya.

Ketiga, proses output. Meliputi intensitas pengetahuan dan pembuaan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang berkesan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan-keputusan otoritatif.

Keempat, diri sendiri. Meliputi intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik. Disini dipersoalkan apakah yang menjadi hak, kekuasaan dan kewajibannya.

Menurut Kantaprawira (1988:30-31) budaya politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, budaya politik parokial (*parochial political culture*): adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan/kekuasaan politik dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat yang bersifat parokial ini, karena terbatasnya diferensiasi tidak terdapat peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Pada kebudayaan ini anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu tempat dimana ia terikat secara sempit.

Kedua, budaya politik kawula (*subject political culture*): anggota masyarakatnya mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran, terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama terhadap segi outputnya. Orientasi mereka yang nyata terhadap objek politik dapat terlihat dari pernyataannya, baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap bermusuhan terhadap sistem, terutama terhadap aspek outputnya. Posisinya sebagai kawula pada pokoknya dapat dikatakan posisi yang pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau merubah sistem

dan karena itu ia menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan para pemegang jabatan dalam masyarakatnya.

Ketiga, budaya politik partisipan (*participant political culture*): anggota masyarakat yang menganggap dirinya sebagai anggota yang aktif dalam kehidupan politik. Ia dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggungjawabnya (kewajibannya) dan dapat pula merealisasi serta mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya. Seseorang dalam budaya partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran baik sistem sebagai totalitas, input dan output maupun posisinya sendiri. Ia sendiri terlibat dalam proses politik dalam sistem politik tertentu betapapun kecilnya.

Ketiga budaya politik ini ada pada masyarakat Indonesia. Budaya politik parokial ada pada masyarakat kecil yang umumnya berpendidikan rendah. Mereka kurang peduli dengan output dari pemerintah, sepanjang tidak mempengaruhi hajat hidup mereka.

Sementara Budaya politik kawula biasaya ada pada masyarakat menengah ke atas dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mempunyai minat dan perhatian pada isu-isu politik, tetapi selalu pasrah karena merasa mereka tidak punya kekuatan untuk

mempengaruhi atau merubah kebijakan pemerintah.

Sedangkan budaya politik partisipan ada pada anggota masyarakat yang merasa memiliki pengaruh meski sekecil apapun dalam pembuatan keputusan pemerintah. Para elit politik, elit partai, *pressure group* atau kelompok-kelompok penekan seperti LSM, atau bahkan sekelompok mahasiswa yang aktif melakukan demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, merupakan contoh budaya politik partisipan.

#### **4. Penutup**

Budaya politik pada masyarakat Indonesia meliputi tiga macam, yaitu budaya politik parokial, kawula dan partisipan. Budaya politik parokial terlihat pada masyarakat kecil yang umumnya berpendidikan rendah. Mereka cenderung kurang peduli dengan output yang keluar dari pemerintah, yang menurut mereka tidak mempengaruhi hajat hidup mereka.

Budaya politik kawula lazimnya terjadi pada masyarakat menengah ke atas dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki minat dan perhatian pada isu-isu politik, tetapi cenderung pasrah karena merasa mereka tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi atau merubah kebijakan pemerintah.

Sementara budaya politik partisipan tampak pada anggota masyarakat yang merasa mempunyai pengaruh sekecil apapun dalam pembuatan keputusan pemerintah. Para elit politik, elit partai, *pressure group* atau kelompok-kelompok penekan seperti LSM, atau bahkan sekelompok mahasiswa yang aktif melakukan demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, merupakan contoh budaya politik partisipan

#### **Daftar Pustaka**

- Almond, Gabriel A dan Verba, Sidney. 1990. Budaya Politik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Anwar. 2011. Sistem Komunikasi Indonesia. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kantaprawira, Rusadi. 1988. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Lubis, Lusiana Andriani. 2002. Komunikasi Antar Budaya, Medan: USU digital library.
- Zed, Mestika. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

